



Kinerja Penyuluh Pertanian di BPP Toware Kabupaten Jayapura

Alum Turnip*, Avelinus Lefaan, Ferry Rendra P. P. Sitorus

Program Doktor Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih, Indonesia

*E-mail Korespondensi Penulis: turnipalexander5@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Performance;
Agricultural Extension
Workers; BPP Toware;
Jayapura; Papua

How to Cite:

Turnip A., Lefaan A., &
Sitorus, F. R. P. P. (2024).
Kinerja Penyuluh
Pertanian di BPP Toware
Kabupaten Jayapura.
Jurnal Ekologi Birokrasi,
12(3): 174-182.

DOI:

10.31957/jeb.v13i1.4199

ABSTRACT

This study aims to evaluate the performance of agricultural extension workers in BPP Toware, Jayapura Regency, and the factors influencing their effectiveness. The research used a descriptive qualitative method, with in-depth interviews, direct observation, and documentation as the main research instruments. Data were collected through purposive sampling, involving agricultural extension workers and farmers as key informants. The data analysis employed thematic analysis, including data reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings revealed that although extension workers play a critical role in farmer empowerment, their performance is hindered by several challenges, such as insufficient facilities, low welfare levels, and inadequate training. Another significant factor affecting performance is the varied educational background, with a dominance of high school graduates among contract workers, limiting their technical competency. Consequently, the performance of extension workers in fostering behavioral change towards sustainable agricultural development remains suboptimal.

Copyright © 2024 JEB. All rights reserved.

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Kinerja; Penyuluh
Pertanian; BPP Toware;
Jayapura; Papua

Cara Mengutip:

Turnip A., Lefaan A., &
Sitorus, F. R. P. P. (2024).
Kinerja Penyuluh
Pertanian di BPP Toware
Kabupaten Jayapura.
Jurnal Ekologi Birokrasi,
12(3): 174-182.

DOI:

10.31957/jeb.v12i3.4199

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja penyuluh pertanian di BPP Toware, Kabupaten Jayapura, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan instrumen penelitian berupa wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Data dikumpulkan melalui teknik purposive sampling dengan melibatkan penyuluh pertanian dan petani sebagai informan utama. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penyuluh berperan penting dalam pemberdayaan petani, kinerja mereka dipengaruhi oleh beberapa kendala, seperti kurangnya dukungan sarana dan prasarana, rendahnya tingkat kesejahteraan, serta kurangnya pelatihan yang memadai. Faktor lain yang mempengaruhi kinerja adalah tingkat pendidikan yang bervariasi, dengan dominasi lulusan SMA pada penyuluh THL, yang berdampak pada keterbatasan kompetensi teknis. Akibatnya, kinerja penyuluh dalam mendukung perubahan perilaku petani menuju pembangunan pertanian berkelanjutan belum optimal.

Hak Cipta© 2024 JEB. Seluruh Hak Cipta.

1. Pendahuluan

Kinerja penyuluh pertanian dalam memberdayakan petani adalah perilaku aktual yang diperagakan penyuluh sebagai kewajibannya mengemban tugas-tugas pemberdayaan yang diamanahkan kepadanya, yang diukur dari tingkat kepuasan petani. Kinerja penyuluh pertanian dalam bekerja secara profesional adalah sangat ditentukan oleh : pendidikan formal, pelatihan, umur, motivasi, pemanfaatan media penyuluhan, dan masa kerja / pengalaman kerja penyuluh pertanian, ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan, sistem penghargaan, jarak wilayah kerja, jumlah desa binaan, jumlah kelompok tani binaan, teknologi informasi, tingkat partisipasi aktif petani, hubungan dalam organisasi, dan dukungan pembinaan dan supervise (Syachbudy, 2023).

Marliati (2018) mengidentifikasi beberapa masalah krusial yang dihadapi dalam lembaga penyuluhan pertanian. Salah satu masalah utama adalah kurangnya kelembagaan penyuluhan yang terintegrasi, yang menyebabkan koordinasi yang buruk antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Hal ini berdampak pada pengalokasian dana yang tidak jelas dan bersifat egosektoral, sehingga manfaat penyuluhan tidak optimal dirasakan oleh petani. Selain itu, penyuluh sering kali tidak mendapatkan dukungan yang memadai dalam pengembangan kompetensi mereka, seperti kesempatan belajar atau pelatihan, karena terkendala biaya operasional yang tinggi. Kondisi ini membuat penyuluh sulit untuk mengembangkan keterampilan mereka, dan kreatifitas penyuluh juga terhambat oleh adanya manajemen yang terlalu terpusat, yang tidak memberi ruang untuk inovasi.

Di sisi lain, banyak kabupaten dan kota yang belum membentuk kelembagaan penyuluhan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 16 Tahun 2006, sehingga lembaga-lembaga ini tidak mendapatkan alokasi anggaran yang cukup untuk pengembangan program, perangkat media informasi, atau balai penyuluhan.

Akibatnya, kinerja penyuluh menurun karena terbatasnya dana untuk mendukung penyebaran informasi dan pendampingan bagi petani. Lembaga penyuluhan juga cenderung mengabaikan kegiatan penting seperti pengembangan profesionalitas penyuluh, penyusunan materi, evaluasi, dan pelaporan hasil penyuluhan, yang semakin menurunkan tingkat kepercayaan petani terhadap peran penyuluh. Lembaga-lembaga ini masih banyak mempekerjakan staf yang berusia di atas 51 tahun, sementara tenaga kerja muda yang produktif masih sangat sedikit, sehingga kreativitas dan kesadaran akan pentingnya pengembangan profesional kurang berkembang.

Selain itu, lembaga penyuluhan juga menghadapi masalah internal lainnya, seperti penempatan penyuluh yang tidak tepat oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta minimnya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kinerja penyuluh. Penyuluh yang berpendidikan tinggi lebih cenderung menempati jabatan struktural, sedangkan mereka yang berpendidikan rendah kurang termotivasi untuk mengembangkan kompetensi diri akibat kurangnya dukungan. Program diklat penyuluhan pun belum mampu menyediakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan penyuluh, dan lebih dilihat sebagai kewajiban untuk memperoleh nilai kredit daripada sebagai kesempatan pengembangan keterampilan. Beban kerja yang terlalu banyak dan sering kali di luar tugas pokok penyuluh, juga mengurangi kesempatan bagi mereka untuk berinovasi. Sistem anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah sering kali menimbulkan masalah, terutama dalam hal intervensi kepala dinas, yang turut memperumit proses penyusunan kebijakan dan program di lembaga penyuluhan.

Undang-undang No. 16 Tahun 2006 pada Pasal 8 bahwa kelembagaan penyuluh pemerintah pada tingkat pusat berbentuk badan yang bertugas untuk menangani penyuluhan yaitu a. menyusun kebijakan nasional, program penyuluhan nasional, standarisasi dan akreditasi tenaga penyuluh, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan; b. menyelenggarakan pengembangan penyuluhan, pangkalan data, pelayanan, dan jaringan informasi penyuluhan; c. melaksanakan penyuluhan, koordinasi, penyediaan, pemantauan dan evaluasi, serta alokasi dan distribusi sumber daya penyuluhan; d. melaksanakan kerja sama penyuluhan nasional, regional, dan internasional; dan e. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS; f. bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian. Pasal 32 bahwa untuk menyelenggarakan penyuluhan yang efektif dan efisien diperlukan tersedianya pembiayaan yang memadai untuk memenuhi biaya penyuluhan yang disediakan melalui APBN, APBD baik provinsi maupun kabupaten/kota, baik secara sektoral maupun lintas sektoral sedangkan pembiayaan penyuluhan yang berkaitan dengan tunjangan jabatan fungsional dan profesi, biaya operasional penyuluh PNS, serta sarana dan prasarana bersumber dari APBN, sedangkan pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa bersumber dari APBD yang jumlah dan alokasinya disesuaikan dengan program penyuluhan dan besarnya jumlah tunjangan jabatan fungsional dan profesi penyuluh PNS didasarkan pada jenjang jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Departemen Pertanian R.I, 2013).

Revitalisasi Penyuluhan Pertanian adalah suatu upaya mendudukkan, memerankan dan memfungsikan serta menata kembali penyuluhan pertanian agar terwujud kesatuan arah kebijakan. Keberhasilan pelaksanaan revitalisasi ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat pelaku usaha pertanian. Program revitalisasi difokuskan penataan kelembagaan penyuluhan pertanian, peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluh

pertanian, peningkatan kelembagaan dan kepemimpinan petani, peningkatan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dan pengembangan (Zulfikar, 2018).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka artikel ini bertujuan untuk mereview bagaimana seharusnya untuk meningkatkan kinerja penyuluh pertanian di era revitalisasi yang dilakukan dan langkah seperti apa yang seharusnya diambil agar kinerja penyuluh pertanian untuk dapat merubah perilaku petani di BPP Toware Kabupaten Jayapura.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena terkait kinerja penyuluh pertanian secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian kualitatif deskriptif berfokus pada pemahaman situasi atau kondisi nyata yang dihadapi oleh para penyuluh di lapangan, serta bagaimana mereka melaksanakan tugas dan fungsi mereka. Hasilnya berupa narasi yang menggambarkan kinerja penyuluh secara rinci, tanpa menggunakan pendekatan statistik atau kuantifikasi, melainkan melalui deskripsi langsung dari pengalaman dan persepsi para informan terkait kinerja dan efektivitas program penyuluhan pertanian di BPP Toware.

Teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan penyuluh pertanian, petani, dan pihak terkait menggunakan purposive sampling, yakni pemilihan informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dengan kinerja penyuluh. Instrumen penelitian utama adalah peneliti itu sendiri, yang menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur serta lembar observasi untuk mencatat temuan di lapangan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik analisis tematik, yang meliputi pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dari data (Miles & Huberman, 1992), dengan validasi melalui triangulasi, membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini diharapkan mampu menggambarkan secara menyeluruh bagaimana kinerja penyuluh pertanian di BPP Toware dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3. Hasil dan Pembahasan

Penyuluh pertanian memegang peran penting dalam peningkatan kualitas dan produktivitas sektor pertanian di Indonesia. Sebagai ujung tombak dalam transfer teknologi dan inovasi, penyuluh bertugas untuk memberikan bimbingan dan informasi kepada petani terkait teknik-teknik pertanian modern, manajemen usaha tani, serta penerapan praktik-praktik pertanian berkelanjutan. Selain itu, mereka juga berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dengan petani, memastikan kebijakan dan program-program pertanian dapat dilaksanakan dengan efektif di tingkat lapangan.

Fungsi penyuluh tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga mencakup pemberdayaan masyarakat tani melalui pembinaan kelompok-kelompok tani, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan akses petani terhadap sumber daya produksi. Dengan demikian, penyuluh pertanian berperan dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui pembangunan pertanian yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 1a. Kondisi tenaga penyuluh pertanian di BPP Toware 2023.

NO	JUMLAH PENYULUH BPP TOWARE	JENIS KELAMIN		UMUR/ORANG (TAHUN)				TINGKAT PENDIDIKAN			STATUS		WKPP
		L	P	60	58-59	51-53	38-43	S1	D3	SLTA/SPMA	ASN	THL	
1	23	10	13	2	3	4	14	14	1	8	15	8	23

Sumber : BPP Toware Kabupaten Jayapura

Tabel di atas memberikan gambaran tentang kondisi tenaga penyuluh pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Toware, Kabupaten Jayapura, pada tahun 2023. Tabel tersebut mencakup berbagai aspek demografis, termasuk jumlah penyuluh, jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, status pekerjaan, dan distribusi wilayah kerja penyuluh pertanian. Dapat dilihat bahwa jumlah total penyuluh di BPP Toware adalah 23 orang, dengan komposisi jenis kelamin yang relatif seimbang, yaitu 10 laki-laki dan 13 perempuan. Dari segi usia, mayoritas penyuluh berada di rentang usia 38-43 tahun (14 orang), sementara penyuluh yang berusia 58-59 tahun hanya berjumlah dua orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga penyuluh berada dalam usia produktif dan memiliki potensi untuk berkontribusi dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Terkait tingkat pendidikan, mayoritas penyuluh memiliki gelar Sarjana (S1) sebanyak 14 orang, diikuti oleh 8 orang lulusan SLTA/SPMA, dan hanya 1 orang yang berpendidikan D3. Dalam hal status pekerjaan, 15 penyuluh berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), sementara 8 lainnya merupakan Tenaga Harian Lepas (THL). Jumlah penyuluh yang bekerja di wilayah kerja penyuluhan pertanian (WKPP) sesuai dengan total penyuluh, yaitu 23 orang, menunjukkan bahwa semua penyuluh terlibat aktif dalam kegiatan di lapangan.

Tabel 1b. Data base tenaga penyuluh pertanian di BPP Toware 2023

DATA BASE BPP TOWARE TAHUN 2023								
NO	NAMA/ NIP	TTL	JENIS KELAMIN	PEND. AKHIR	PANGKAT	GOL	TEMPAT TUGAS	KET.
1	Ir. METY 19630507199203 2 004	Langoan, 7/5/1963	P	S 1	Pembina Utama Muda	IV/C	Sentani Kota, Sereh	
2	Ir. ASRILLAH 19630717199803 1 005	Kendari, 17/7/1963	L	S1	Pembina TK.I	IV/B	Sabron Sari	
3	YANCE NARI, SST 196701171996101 001	Jayapura, 17-01-1967	L	S1	Penata	III/C	Karneyakha, Abar	
4	YOAB KAMBAY, SP 196507061996 10 1011	Putali, 6/7/1965	L	S1	Penata	III/C	Yakonde	
5	YENNY PUPA, SP 1971020200805 2 002	Tanah Toraja, 2/2/1971	P	S1	Penata	III/C	Nendali dan Doyo Lama	
6	ALFRIDA URSULA CIAY, SP 19810404201104 2 002	Jayapura, 04/04/1981	P	SI	Penata Muda TK.I	III/B	Hinekombe	
7	MATHEUS OIWARI, SST 19840317201004 1001	Sentani, 17/03/1984	L	S1	Penata Muda TK.I	III/B	Fiafuw, Toladan	
8	UJORO WALLY, S. Pt 198505022011 041002	Yakonde-jyp, 02/05/1985	L	S1	Penata Muda TK.I	III/B	Sosiri	
9	HARTINI, SP 19831112201706 2 003	Jayapura, 12/11/1983	P	S1	Penata Muda	III/A	Yobeh	
10	YUNUS KODO, SST 19720301 199303 1 004	Takalar, 1/3/1972	L	S1	Penata Muda	III/A	Itakiwa, Asei Besar	
11	HESTI FELLE, SST 19851004 201706 2 002	Jayapura, 04/10/1985	P	S1	Penata Muda	III/A	Kwadeware	
12	LIS HELENA D. KOLIN, SST 19830128 2010 04 2 003	Yomber/Manokwari, 28/1/1983	P	S1	Penata Muda	III/A	Dondai	
13	WARDIANTO 19651206 199803 1 007	Purworejo, 6/12/1965	L	SPP/SPMA	Pengatur TK. I	III/D	Waibron	
14	TIRSANETA TOKORO 19830407201706 2 003	Sentani, 07/04/1983	P	SLA	Pengatur Muda	III/A	Nolokla	
15	YORGENI WALLY 19820228 201706 1 002	Babrongko, 28/02/1982	L	SLA	Pengatur Muda	III/A	Babrongko, Homfelo	
16	MERIANI TELAUMBANUA 19820228 201706 1 002	Nias, 16/05/1975	P	SLA	THL-TB		Dobonsolo dan Yahim	
17	LEFRINCE AWINERO 19820228 201706 1 002	Nafri, 08/07/1979	P	SLA	THL-TB		Ifar Besar	
18	JENI J. TALAHAU 19820228 201706 1 002	Ambon, 26/06/1969	P	S1	THL-TB		Asei Kecil	
19	YULIANUS AWOITAUW 19820228 201706 1 002	Sentani, 02/07/1977	L	SLA	THL-TB		Yokiwa, Puai	
20	YAN MARWERI 19820228 201706 1 002	Doyo lama, 02/07/1967	L	SLA	THL-TB		Ebung Fa	
21	SULCE MEHUE, SP 19820228 201706 1 002	Yobol, 12/11/1974	P	S1	THL-TB		Sabron Yaru	
22	FERNANDA L. ABRAUW.A.Md 19820228 201706 1 002	Biak, 28/05/1978	P	D.III	THL-TB		Doyo Baru	
23	BETTY YOKU 19820228 201706 1 002	Sentani, 25/04/1976	P	S1	THL-TB		Bambar	

Sumber : BPP Toware Kabupaten Jayapura

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari BPP Toware dan hasil diskusi dengan tenaga penyuluh pertanian selama melakukan kegiatan pelatihan terhadap penyuluh di BPP Toware tentang kondisi tenaga penyuluh dan penerapan Revitalisasi oleh pemerintah Kabupaten Jayapura diperoleh bahwa jumlah penyuluh pertanian di BPP Toware tahun 2023 tercatat sebanyak 23 orang yang terdiri dari 15 orang ASN dan 8 orang THL (Jumlah total tenaga penyuluh pertanian berjumlah 23 orang (Tabel 1a dan 1b). Hal ini dapat dikatakan bahwa perhatian pemerintah masih kurang, dimana kesejahteraan penyuluh belum maksimal diperhatikan. Sesuai hasil diskusi bahwa tunjangan penyuluh terjadi pengurangan signifikan dan pembayaran tunjangan tidak sesuai fakta sebenarnya (kadang dibayar dan kadang tidak dibayar) sehingga mempengaruhi kinerja penyuluh dalam merubah perilaku petani menuju pembangunan pertanian berkelanjutan.

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari BPP Toware dan data primer dari hasil diskusi dengan tenaga penyuluh pertanian selama melakukan kegiatan pelatihan terhadap penyuluh di BPP Toware bahwa Jumlah tenaga penyuluh telah sesuai dengan jumlah wkpp akan tetapi perlu sesuai tamatan dimana penyuluh THL didominasi lulusan SMA sehingga dalam menyampaikan secara teknis kurang kompeten akibatnya petani sulit untuk menerima dan memahaminya. Artinya penjarangan THL penyuluh dari SMA mengakibatkan kinerja penyuluh rendah. Sehingga penyuluh tamatan SMA untuk merubah perilaku petani sangatlah tidak maksimal serta Menurut Bambang, dkk (2022) bahwa penyuluh harus banyak menimba ilmu pada penyuluh diluar tamatan SMA tentang cara bagaimana sebaiknya mengadakan komunikasi terhadap orang atau golongan yang akan dipengaruhi. Bahasa apa yang harus digunakan, kapan dan dimana mereka berada, serta bentuk apa yang mereka inginkan. Dasar ini harus benar-benar dikuasai, sebab dengan membuat kesalahan dalam proses komunikasi berarti akan membuat kegagalan dalam proses penyuluhan selanjutnya.

Menurut Sitti Rosmalah, dkk (2023). Seorang penyuluh dari segi pengetahuan harus menguasai aspek-aspek praktis pertanian, mampu dan cakap mendemonstrasikan materi penyuluhan di lapangan. Berpedoman pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 pada penjelasan tentang ketentuan pengangkatan penyuluh pegawai negeri sipil harus mendapat prioritas oleh Pemerintah dan pemerintah daerah untuk mencukupi kebutuhan tenaga penyuluh pegawai negeri sipil sesuai kebutuhan dan tamatan pendidikan. Ditinjau dari kesejahteraan penyuluh, bahwa dari hasil diskusi dengan penyuluh bahwa kesejahteraan yang dirasakan tidak sesuai dengan PERBUB No. 17 Tahun 2021 tentang insentif selama tahun 2020-2022 bahwa tunjangan insentif (kesejahteraan) tidak diterima penyuluh dengan alasan pengalihan ke Covid 19 akibatnya kinerja penyuluh terjadi penurunan. Menurut Bambang, dkk (2022). Penyuluh adalah petugas pemerintah, selain itu sebagai manusia memerlukan perangsang-perangsang bagi keperluan hidup serta pelaksanaan tugasnya karena itu selain gaji atau honor yang layak diterima, juga pendanaan atau biaya-biaya lainnya seperti uang jajan/transport, uang kerja bimbingan dan sebagainya, juga sangat diperlukan guna menunjang kelancaran kegiatan penyuluhan. Sedangkan ditinjau dari umur penyuluh, dimana umur penyuluh berada pada kisaran umur 45 keatas sehingga akan mempengaruhi kinerja penyuluh itu sendiri. Faktor umur adalah faktor psikologis yang berpengaruh terhadap proses belajar dan efisiensi belajar langsung maupun tidak langsung. Umur 25 tahun adalah umur yang optimal untuk belajar. Pada umur 46 tahun, kemampuan belajar mulai menurun dan akan menurun drastis pada umur 60 tahun.

Menurut M. Hatta Jamil, dkk (2023). Umur berpengaruh terhadap kinerja penyuluh dan usia produktif penyuluh yang umumnya berumur <60 tahun. Menurut Padmowihardjo (2006), umur bukan merupakan faktor psikologis, tetapi apa yang diakibatkan oleh umur adalah faktor psikologis. Seseorang yang berumur 15-25 tahun akan belajar lebih cepat dan berhasil mempertahankan retensi belajar jika diberi bimbingan belajar dengan baik. Kemampuan belajar berkembang hingga usia 45 tahun dan terus menurun setelah mencapai usia 55 tahun. Berdasarkan hasil diskusi dengan penyuluh bahwa kegiatan pelatihan bagi penyuluh di Kabupaten Jayapura jarang dilakukan sehingga mempengaruhi kinerja penyuluh itu sendiri. Menurut Ningrum, dkk. (2013), pendidikan pegawai adalah suatu persyaratan pekerjaan yang dapat ditentukan dalam hubungannya dengan keterampilan dan pengetahuan berdasarkan aktivitas yang sesungguhnya dilaksanakan pada pekerjaan dengan fokus utama pelatihan adalah peningkatan dan pengembangan kompetensi.

Menurut Margono & Sugimoto (2011), peningkatan kompetensi penyuluh dalam pembangunan pertanian melalui upaya untuk meningkatkan: efektivitas pelatihan bagi penyuluh; pengembangan diri penyuluh melalui peningkatan kemandirian belajar dan pengembangan karir penyuluh; dukungan terhadap penyelenggaraan penyuluhan seperti dukungan kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pendanaan penyuluhan, dukungan peran kelembagaan, dukungan teknologi dan sarana penyuluhan, pola kepemimpinan yang berpihak kepada petani; dan motivasi pribadi penyuluh untuk selalu meningkatkan prestasi kinerja penyuluh dan mengikuti perubahan lingkungan strategis yang ada. Hasil pengamatan selama melakukan kegiatan pelatihan yang saya lakukan dengan menggunakan dana widyaiswara sendiri bahwa sarana dan prasarana yang ada di BPP Toware adalah sangat kurang sehingga penyuluh dalam melakukan praktek atau kajian sering menjadi penghambat dan akibatnya secara otomatis akan menurunkan kinerja penyuluh itu sendiri. Ditinjau dari wilayah kinerja penyuluh dan tempat tinggal penyuluh sangat tidak mendukung untuk penyuluh melakukan penyuluhan, dimana rata-rata penyuluh berdomisili di luar BPP Toware, sehingga akan berdampak pada hasil kinerja penyuluh yang kurang efektif dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyuluh dan secara khusus waktu tidak efektif).

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Pasal 32 bahwa untuk menyelenggarakan penyuluhan yang efektif dan efisien diperlukan tersedianya pembiayaan yang memadai untuk memenuhi biaya penyuluhan yang disediakan melalui APBN, APBD baik provinsi maupun kabupaten/kota, baik secara sektoral maupun lintas sektoral, maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sedangkan pembiayaan penyuluhan yang berkaitan dengan tunjangan jabatan fungsional dan profesi, biaya operasional penyuluh PNS, serta sarana dan prasarana bersumber dari APBN, sedangkan pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa bersumber dari APBD yang jumlah dan alokasinya disesuaikan dengan program penyuluhan dan besarnya jumlah tunjangan jabatan fungsional dan profesi penyuluh PNS didasarkan pada jenjang jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan diatas bahwa dapat dikatakan bahwa rendahnya kinerja penyuluh terjadi adalah karena kurang seriusnya pemerintah dalam menangani permasalahan yang terjadi sehingga mengakibatkan perilaku petani sebagai tujuan yang akan dicapai tidak terealisasi. Pemerintah Kabupaten Jayapura sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi keberpihakan terhadap penyuluh pertanian sebagai ujung tombak baik Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten Kota dan secara khusus di BPP Toware Kabupaten Jayapura sehingga tercipta pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Perhatian pemerintah terhadap tenaga penyuluh pertanian masih belum optimal. Kondisi ini menyebabkan kinerja penyuluh belum berdampak signifikan dalam mengubah perilaku petani menuju pembangunan pertanian berkelanjutan. Salah satu kendala utama adalah tingkat pendidikan penyuluh yang mayoritas hanya sampai pada jenjang Sarjana (S1), sementara tenaga harian lepas (THL) didominasi oleh lulusan SMA, padahal idealnya rekrutmen THL seharusnya melibatkan lulusan Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) yang lebih relevan. Selain itu, variasi usia penyuluh pertanian di BPP Toware juga memengaruhi kompetensi dan efektivitas kerja mereka, karena perbedaan usia dapat berdampak pada kemampuan dalam mengadopsi dan menerapkan teknologi pertanian modern.

Permasalahan lain yang memengaruhi kinerja penyuluh pertanian di BPP Toware adalah kurangnya dukungan fasilitas yang memadai untuk menunjang kegiatan penyuluhan. Fasilitas yang kurang lengkap, seperti sarana transportasi, perlengkapan penyuluhan, dan infrastruktur kantor, membuat para penyuluh kesulitan untuk menjalankan tugas dengan optimal. Selain itu, jarak tempat tinggal penyuluh yang jauh dari lokasi BPP Toware dan wilayah kerja penyuluhan pertanian (WKPP) juga menjadi hambatan logistik yang memperlambat pelaksanaan program penyuluhan. Kondisi ini mempengaruhi frekuensi dan kualitas interaksi antara penyuluh dan petani, sehingga upaya mengubah perilaku petani menjadi lebih sulit tercapai.

Untuk meningkatkan kinerja penyuluh pertanian di BPP Toware dan mendukung transformasi perilaku petani menuju pertanian berkelanjutan, diperlukan langkah serius dari Pemerintah Kabupaten Jayapura. Pemerintah perlu melakukan revitalisasi kebijakan yang berpihak kepada penyuluh, seperti merekrut pegawai sesuai dengan kompetensinya, mengadakan pelatihan yang berkala untuk meningkatkan kapasitas penyuluh, serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, perhatian terhadap kesejahteraan penyuluh, seperti penyediaan tempat tinggal yang dekat dengan BPP dan kendaraan operasional, juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Mengingat BPP Toware melayani empat distrik, pemerintah juga perlu mempertimbangkan penambahan kantor BPP untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan penyuluhan di wilayah tersebut.

Daftar Pustaka

- Bambang, dkk. (2022). Peranan penyuluh pertanian lapangan pada masyarakat di era modern. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*, 5. <https://doi.org/ISSN: 2598-4934>
- BPP Toware. (2023). Data base penyuluh pertanian Kabupaten Jayapura.
- Departemen Pertanian R.I. (2013). *Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan*. Jakarta.

- Margono, T., & Sugimoto, S. (2011). The barriers of the Indonesian extension workers in disseminating agricultural information to farmers. *International Journal of Basic and Applied Sciences*.
- Marliati, dkk. (2018). Faktor-faktor penentu peningkatan kinerja penyuluh pertanian dalam memberdayakan petani di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Jurnal Penyuluhan*, 4, September. Institut Pertanian Bogor.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Analisis Data Kualitatif*. UI Press.
- Jamil, M. H., dkk. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penyuluh pertanian dalam masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Penyuluhan*, 19.
- Padmowihardjo. (2006). Penyuluhan pendampingan partisipatif. *Jurnal Penyuluhan*, 2.
- Syachbudy, Q. Q. (2023). Efektivitas program Pajale pada komoditas jagung di Indonesia. *Jurnal Paradigma Agribisnis*, Institut Pertanian Bogor.
- Rosmalah, S., dkk. (2023). Hubungan karakteristik penyuluh dengan kinerja penyuluh di Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe. *Jurnal Penyuluhan*, 19.
- Ningrum, W., dkk. (2013). Pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja karyawan. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 6.
- Zulfikar. (2018). Persepsi petani terhadap kompetensi penyuluh pertanian tanaman pangan di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Penyuluhan*, 14(Maret).